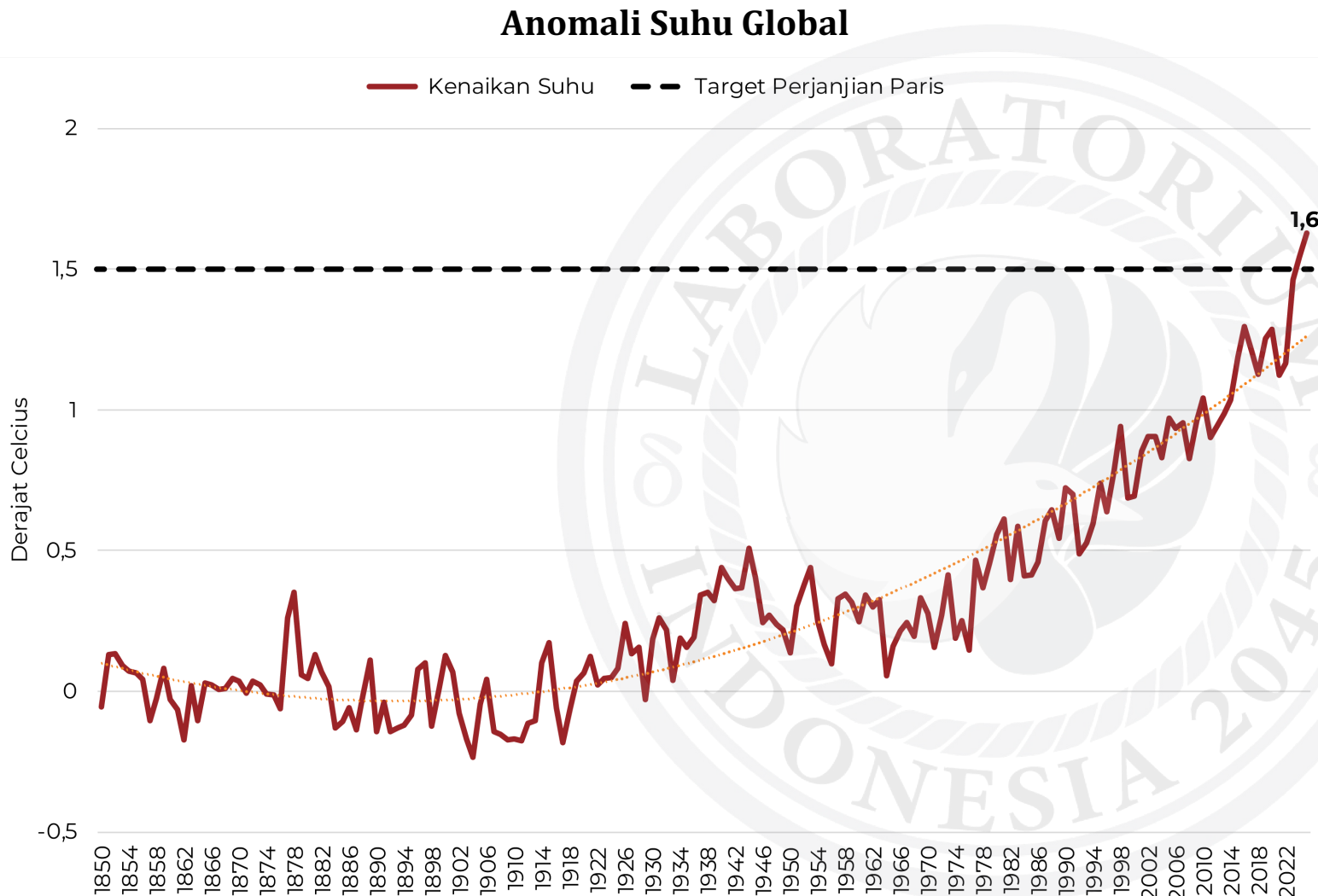




Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi 2045:
**Relasi Demokrasi,
Ekonomi, dan Lingkungan
Hidup**

21 Agustus 2025

Latar Belakang



Sumber: Our World in Data (2025)

Dampak perubahan iklim semakin nyata beberapa tahun belakangan. Tahun 2024 menjadi tahun terpanas

Risiko dari perubahan iklim menjadi yang **tertinggi** beberapa tahun yang akan datang menurut Global Risk Report 2025

Aktivitas ekonomi menjadi penyebab utama dari bencana iklim

Demokrasi seharusnya mampu menjadi **katalis** dalam proteksi lingkungan hidup

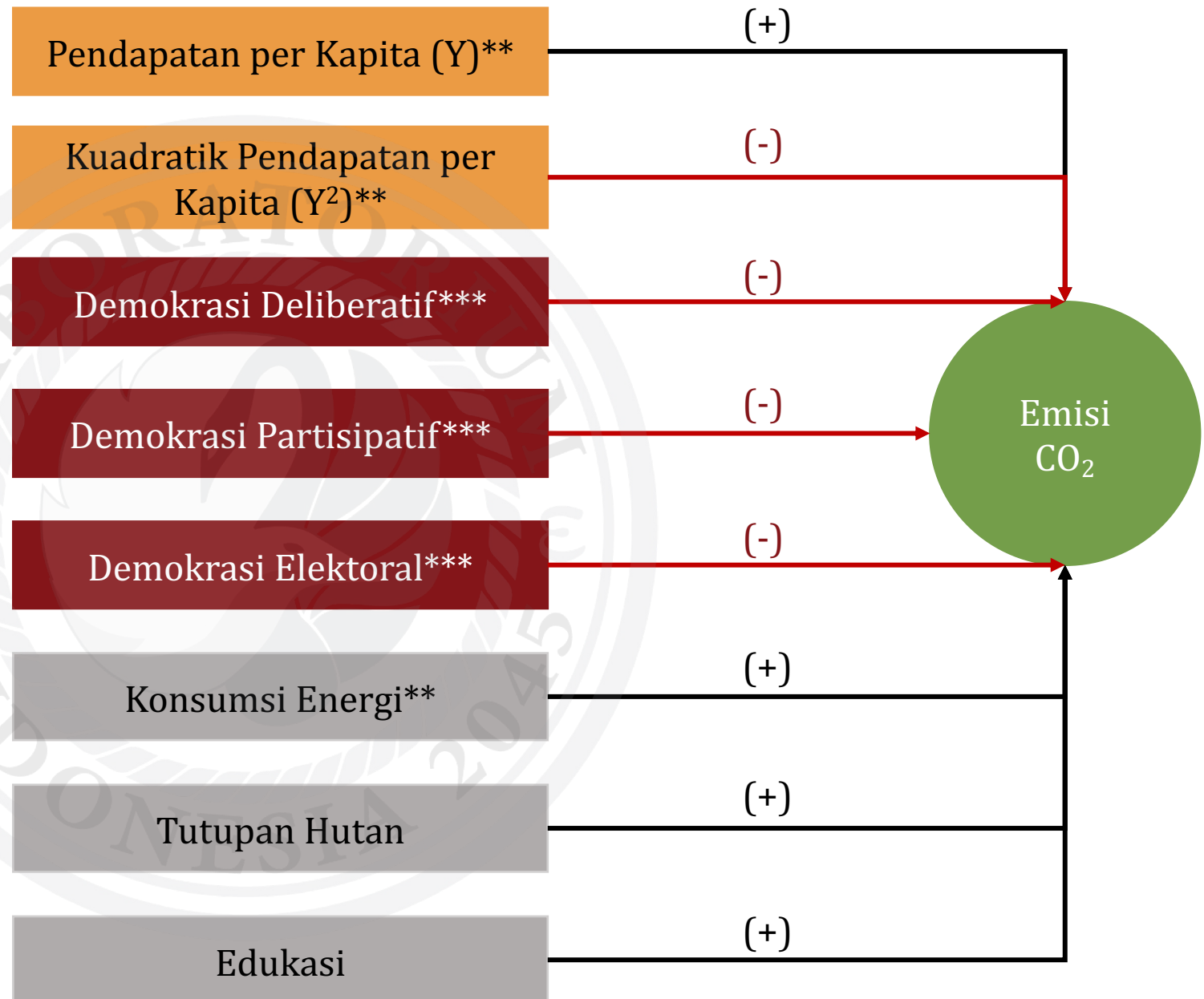
Pertanyaan Utama

Bagaimana pengaruh antara demokrasi dan ekonomi terhadap lingkungan hidup selama 80 tahun Indonesia merdeka?

Upaya apa yang perlu dilakukan agar demokrasi mampu menjadi katalis demi mencapai pembangunan yang pro-lingkungan?

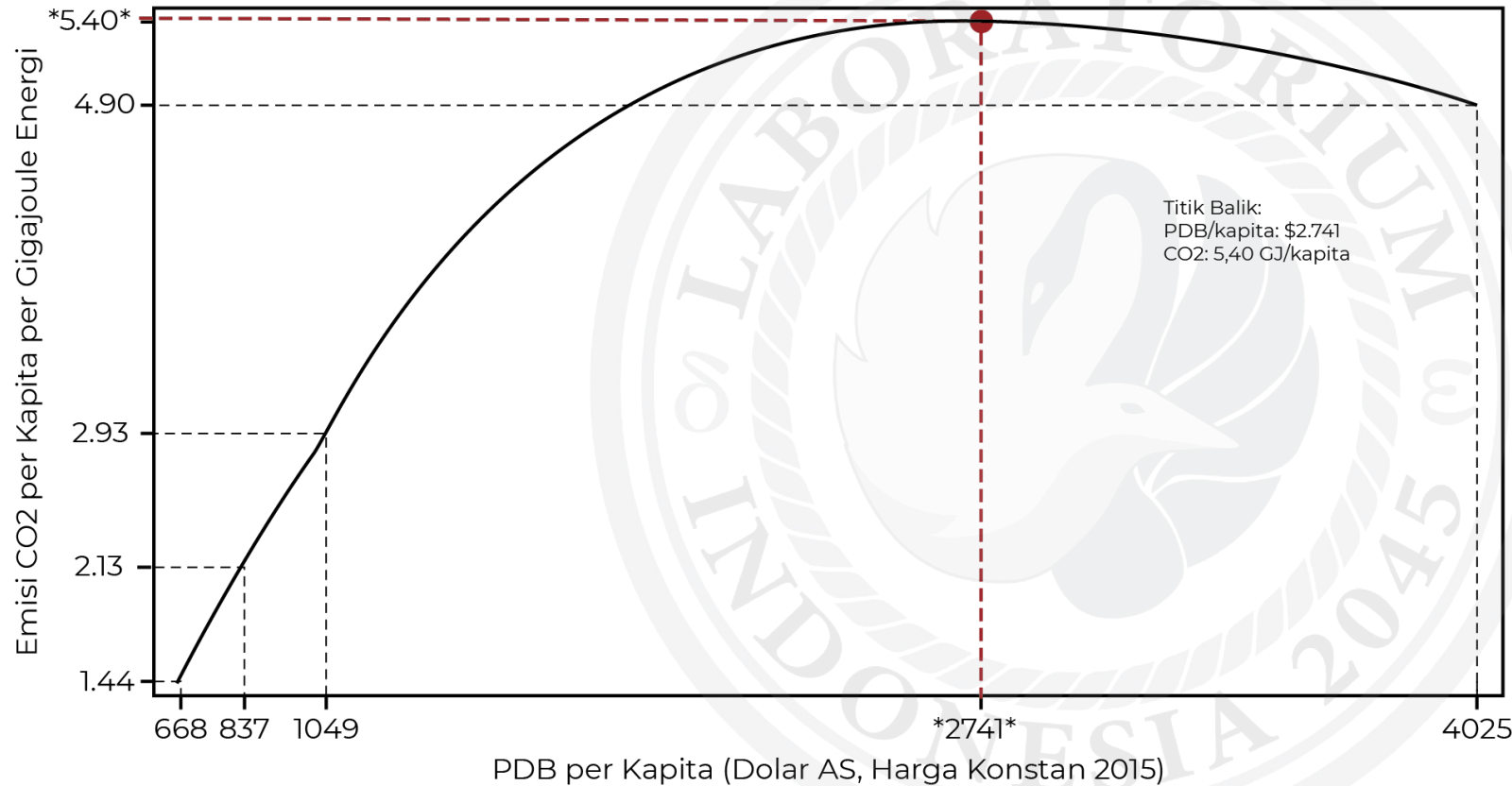
Hasil Estimasi

Hasil estimasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa variabel ekonomi, demokrasi, dan konsumsi energi **berpengaruh signifikan** terhadap emisi karbon. Variabel tutupan lahan dan edukasi **tidak memiliki pengaruh signifikan** secara statistik terhadap emisi dalam penelitian ini. Titik balik EKC tercapai dengan nilai yang berbeda pada setiap model yang digunakan.



Hasil Estimasi

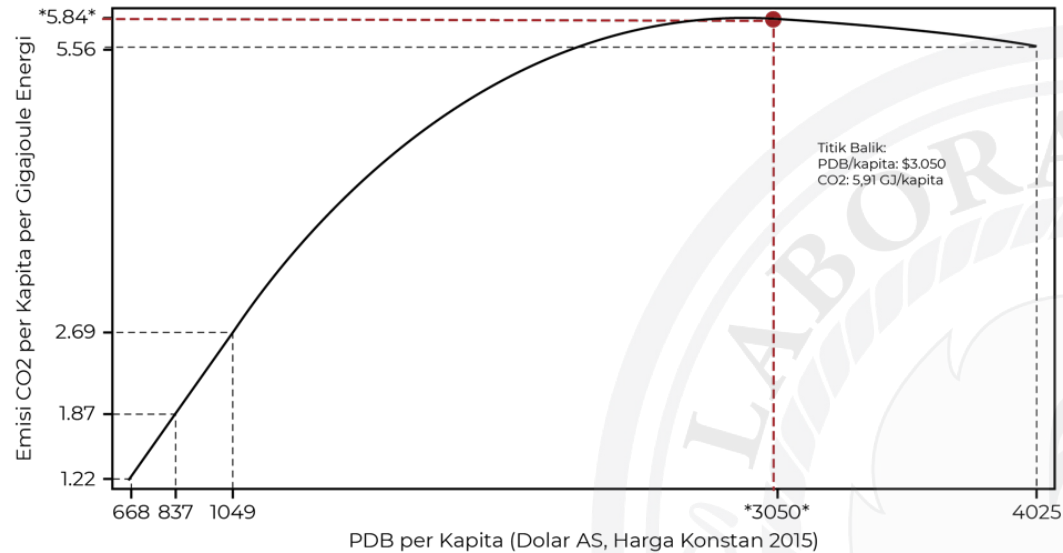
Model EKC



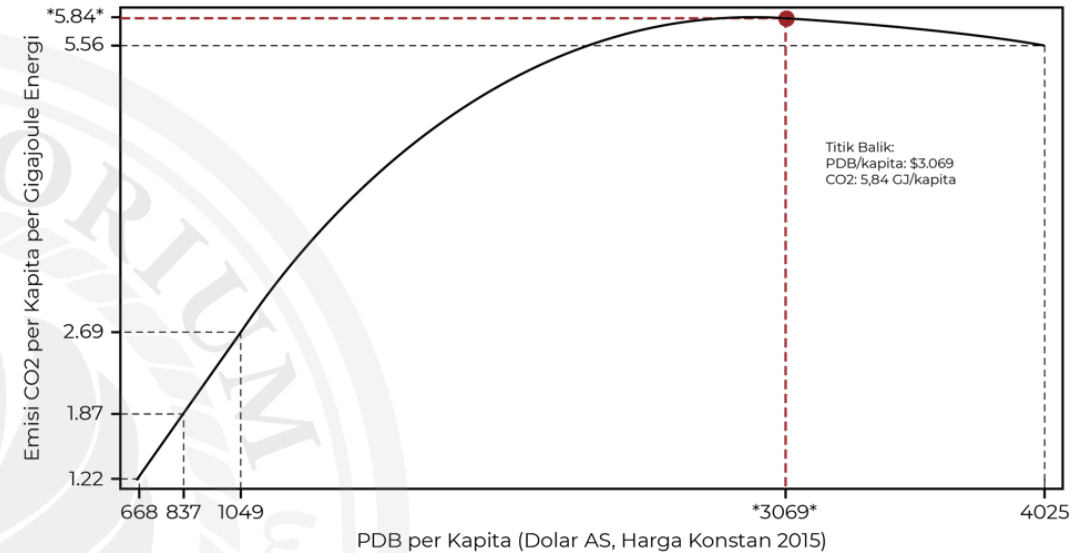
Hasil estimasi menunjukkan bahwa **dalam delapan dekade Indonesia hipotesis EKC terbukti**. Kondisi ini menguatkan bahwa **variabel ekonomi** dalam hal ini pendapatan per kapita merupakan **syarat cukup** untuk mencapai titik balik dari EKC. Capaian kondisi ini tidak terlepas dari transformasi kebijakan yang terjadi khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Hasil Estimasi

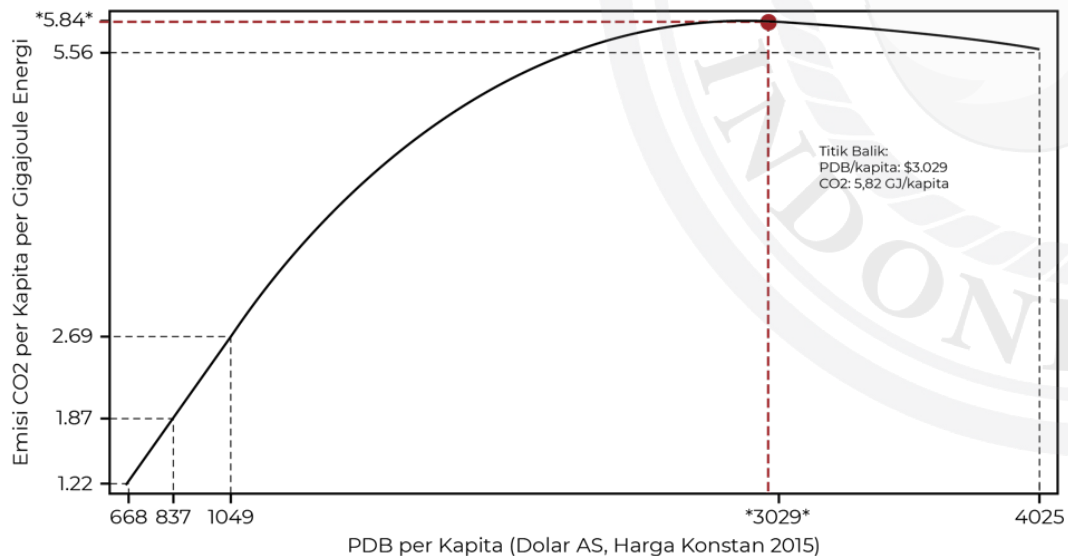
Model EKC + Indeks Demokrasi Deliberatif



Model EKC + Indeks Demokrasi Partisipatif



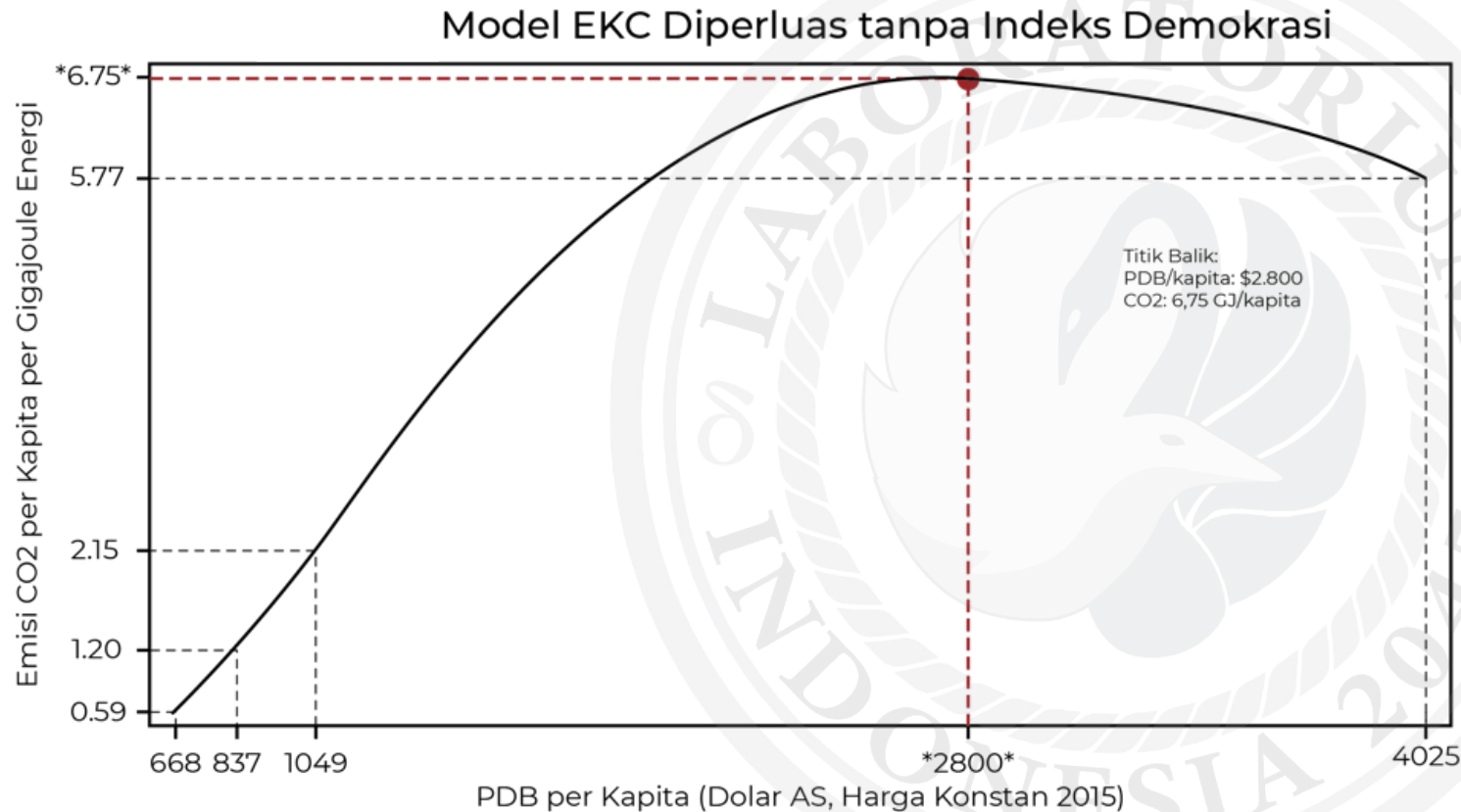
Model EKC + Indeks Demokrasi Elektoral



Berdasarkan pemetaan EKC dengan **variabel demokrasi menunjukkan titik balik yang lebih besar** dibandingkan dengan model yang hanya mempertimbangkan variabel ekonomi saja. Kondisi ini mencerminkan bahwa **demokrasi belum mampu menjadi katalis** dalam proteksi lingkungan hidup.

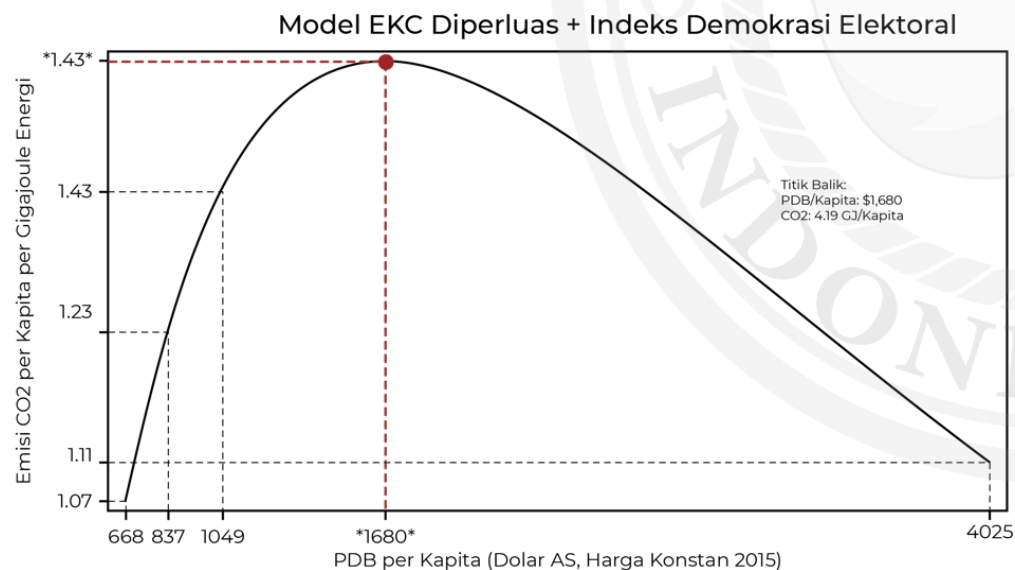
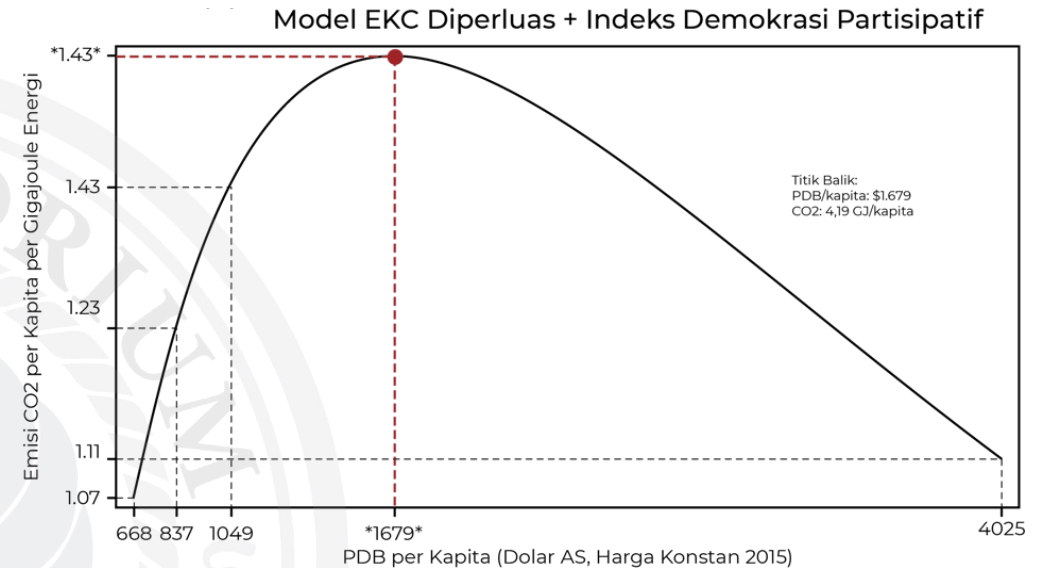
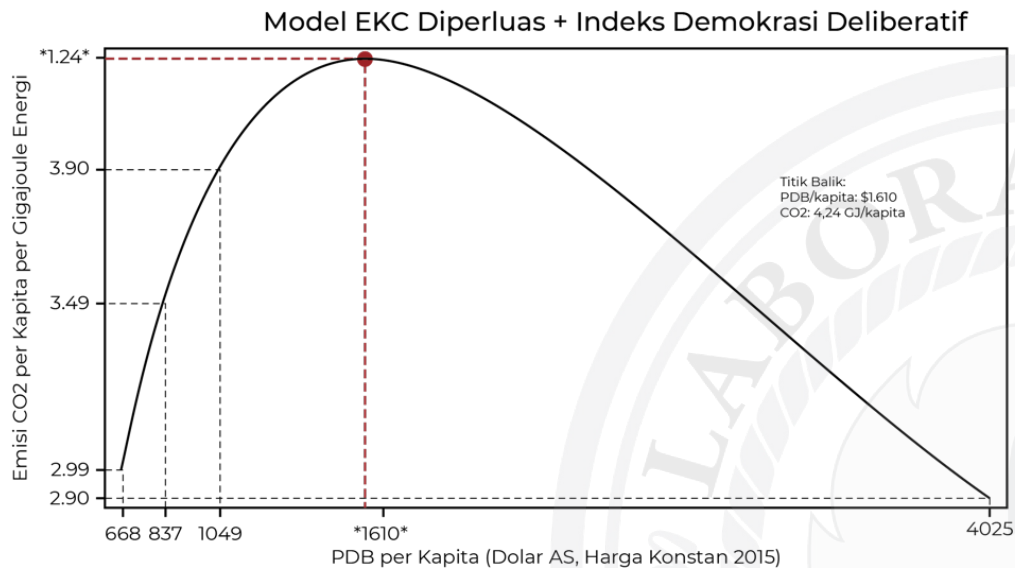
Sumber: Diolah oleh Penulis

Hasil Estimasi



Sebelum melakukan estimasi dengan model lengkap, tim peneliti melakukan estimasi antara model EKC dengan variabel kontrol tanpa variabel demokrasi. **Titik balik pada model ini lebih besar dibanding hanya memperhitungkan variabel ekonomi.** Menegaskan bahwa variabel ekonomi sebagai syarat cukup untuk titik balik EKC.

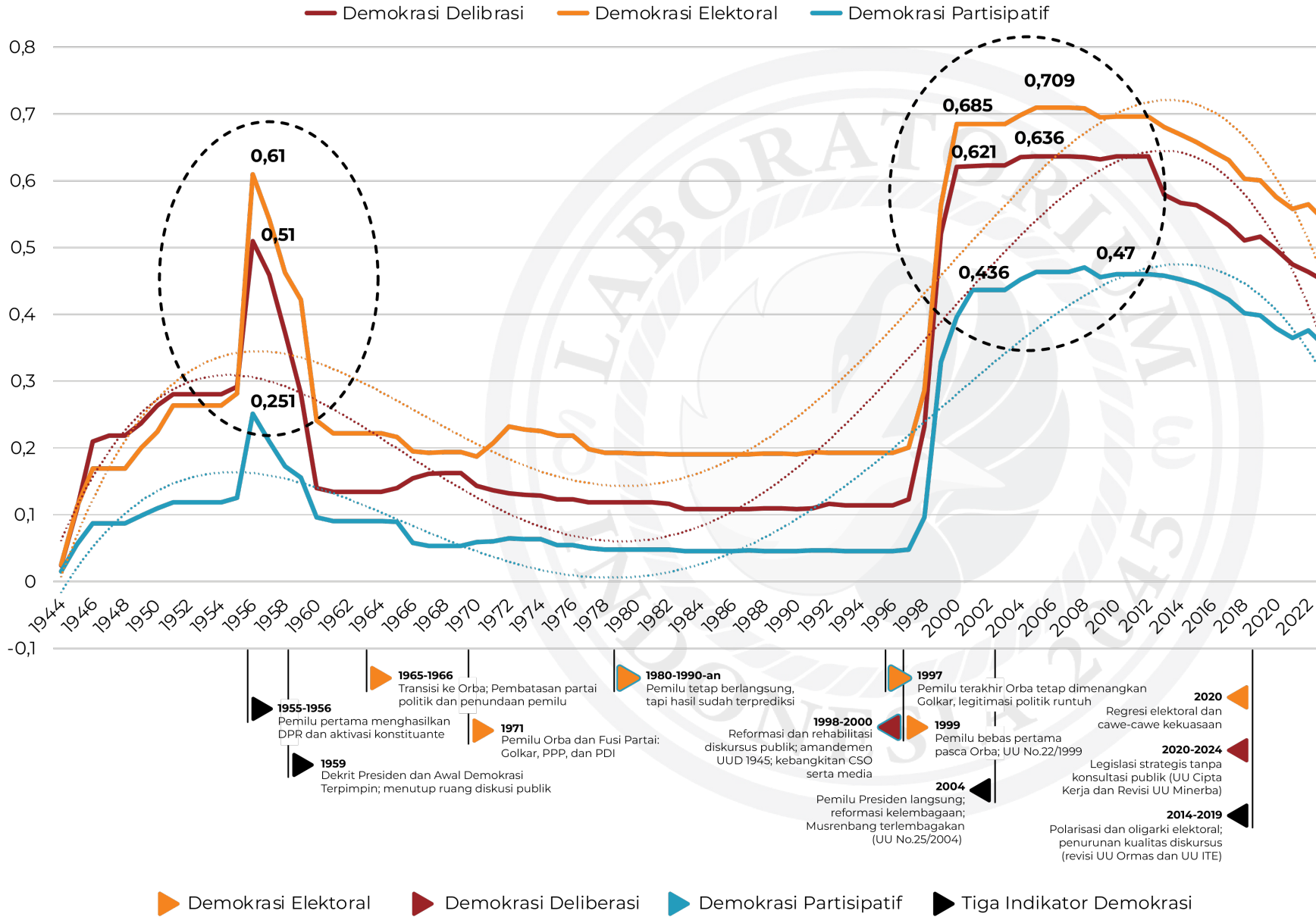
Hasil Estimasi



Hasil estimasi dengan **model lengkap** menunjukkan **titik balik yang lebih cepat** dibandingkan dengan yang lain. Meski begitu, variabel demokrasi **bukan menjadi pengaruh yang terbesar** dalam pencapaian titik tersebut meski memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan hasil estimasi sebelumnya.

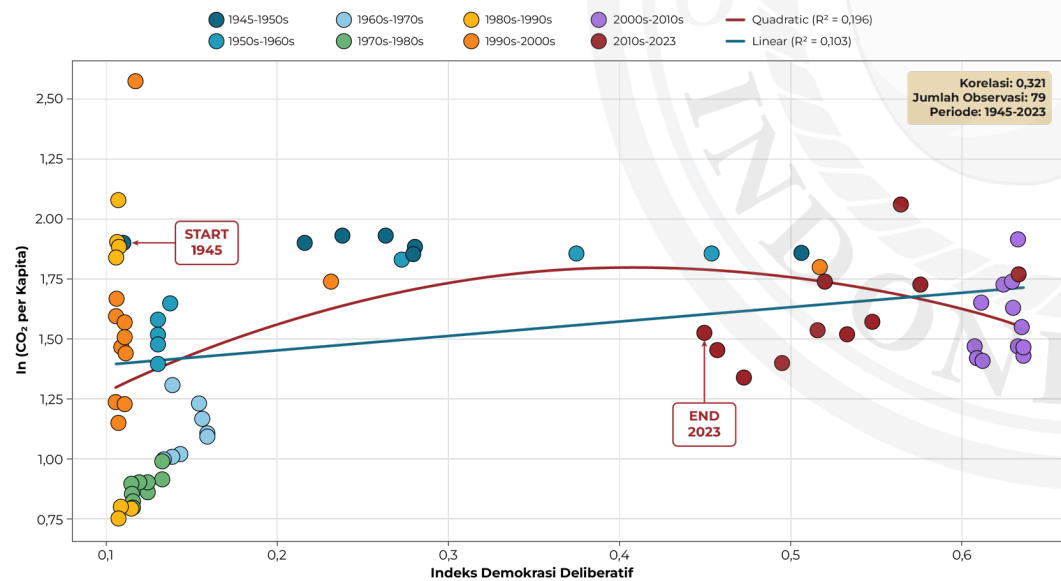
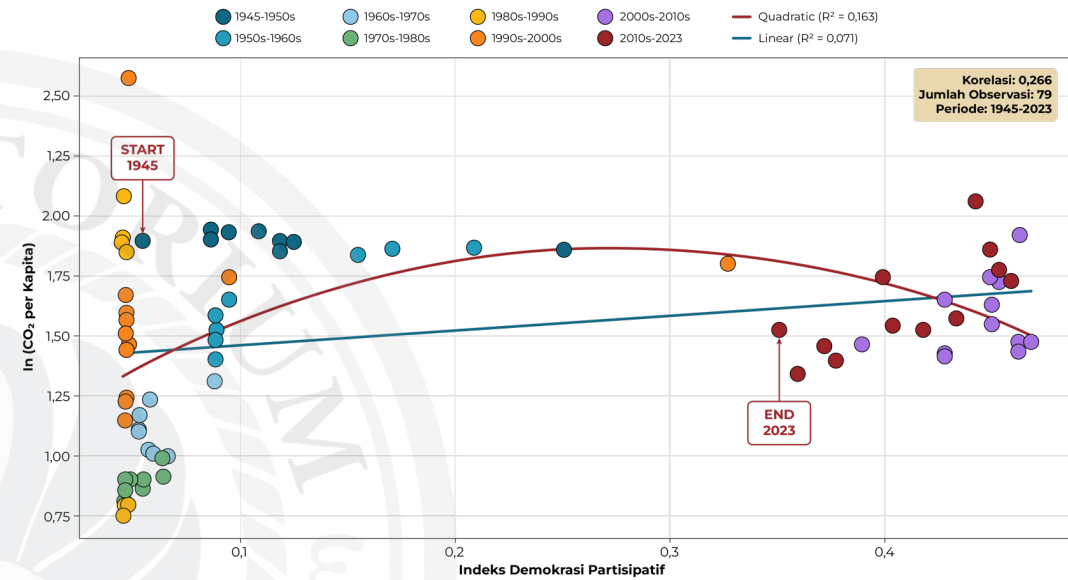
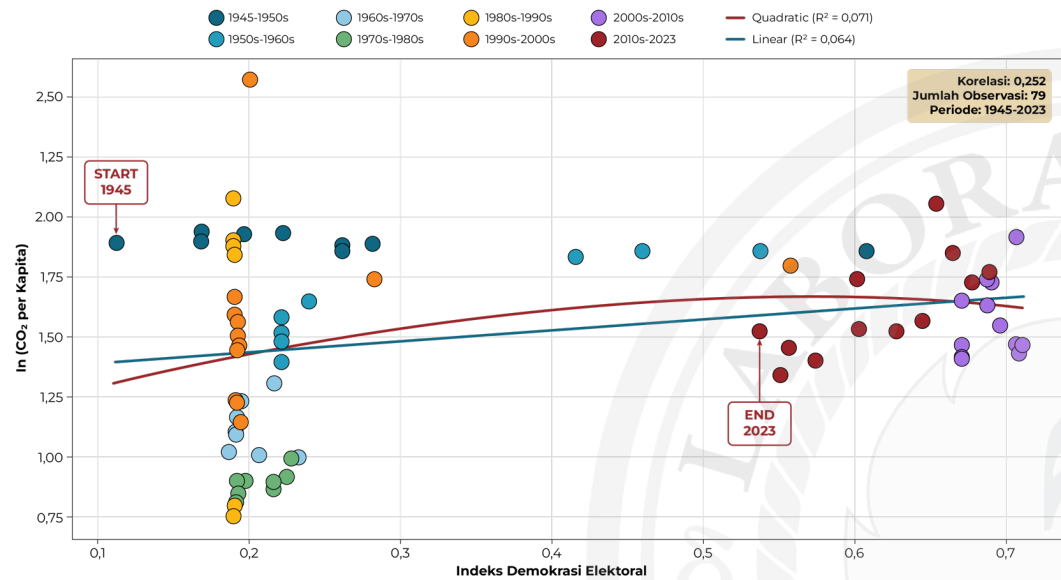
Sumber: Diolah oleh Penulis

Potret Kondisi Demokrasi dan Lingkungan Hidup



Skor demokrasi Indonesia selama delapan dekade berada pada **situasi yang fluktuatif** dengan dua titik perbaikan signifikan pada tahun 1956 dan 2000.

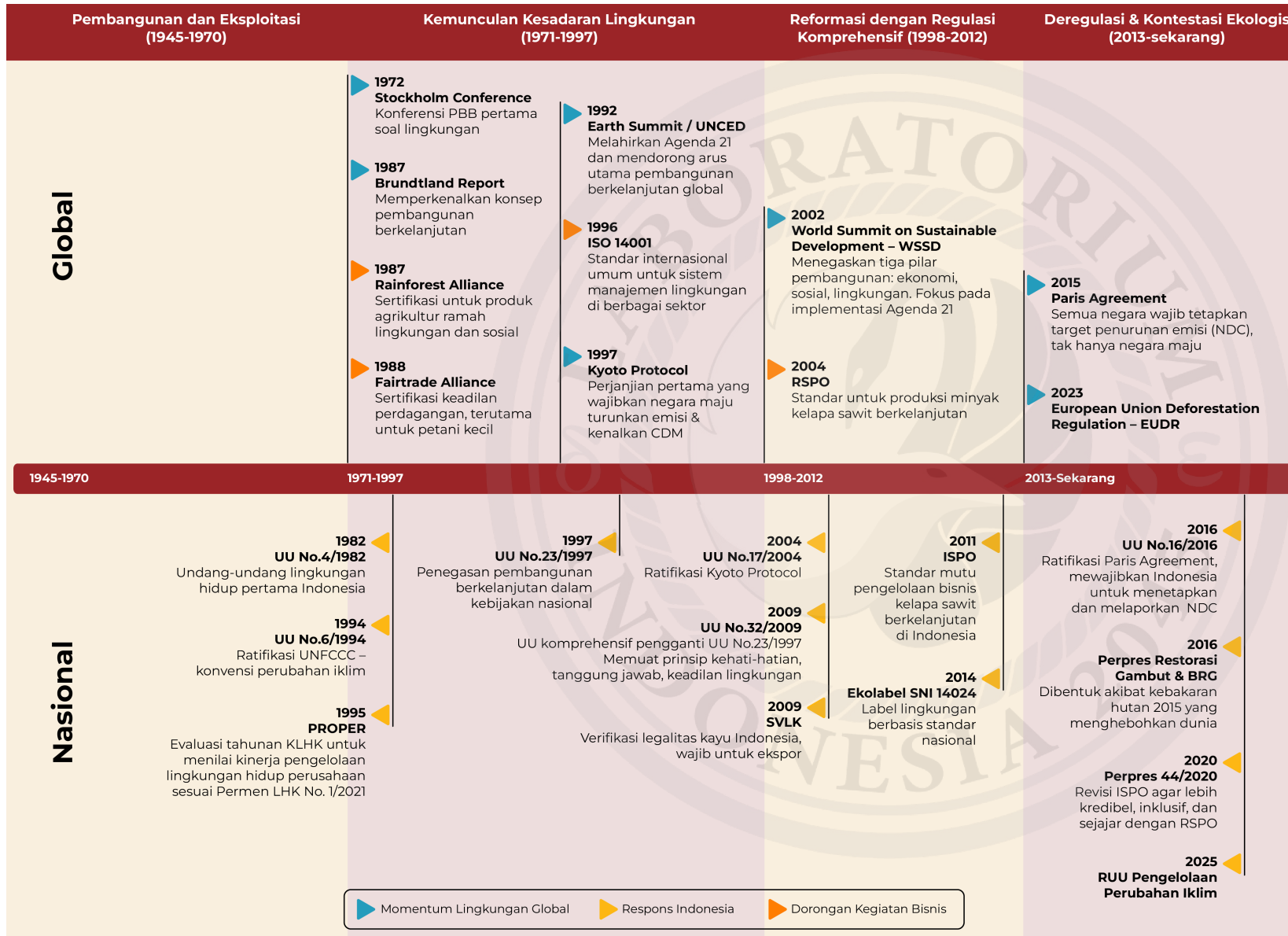
Potret Kondisi Demokrasi dan Lingkungan Hidup



Ekspresi nasionalisme dicerminkan melalui program hilirisasi nikel dan *food estate* perlu dikaji secara lebih komprehensif agar tidak mengabaikan dimensi keberlanjutan. Alih fungsi hutan dan berkurangnya fungsi ekologis kawasan primer telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat sekitar, yang mengindikasikan perlunya keseimbangan antara ambisi pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Sumber: Our World in Data, Diolah oleh Penulis

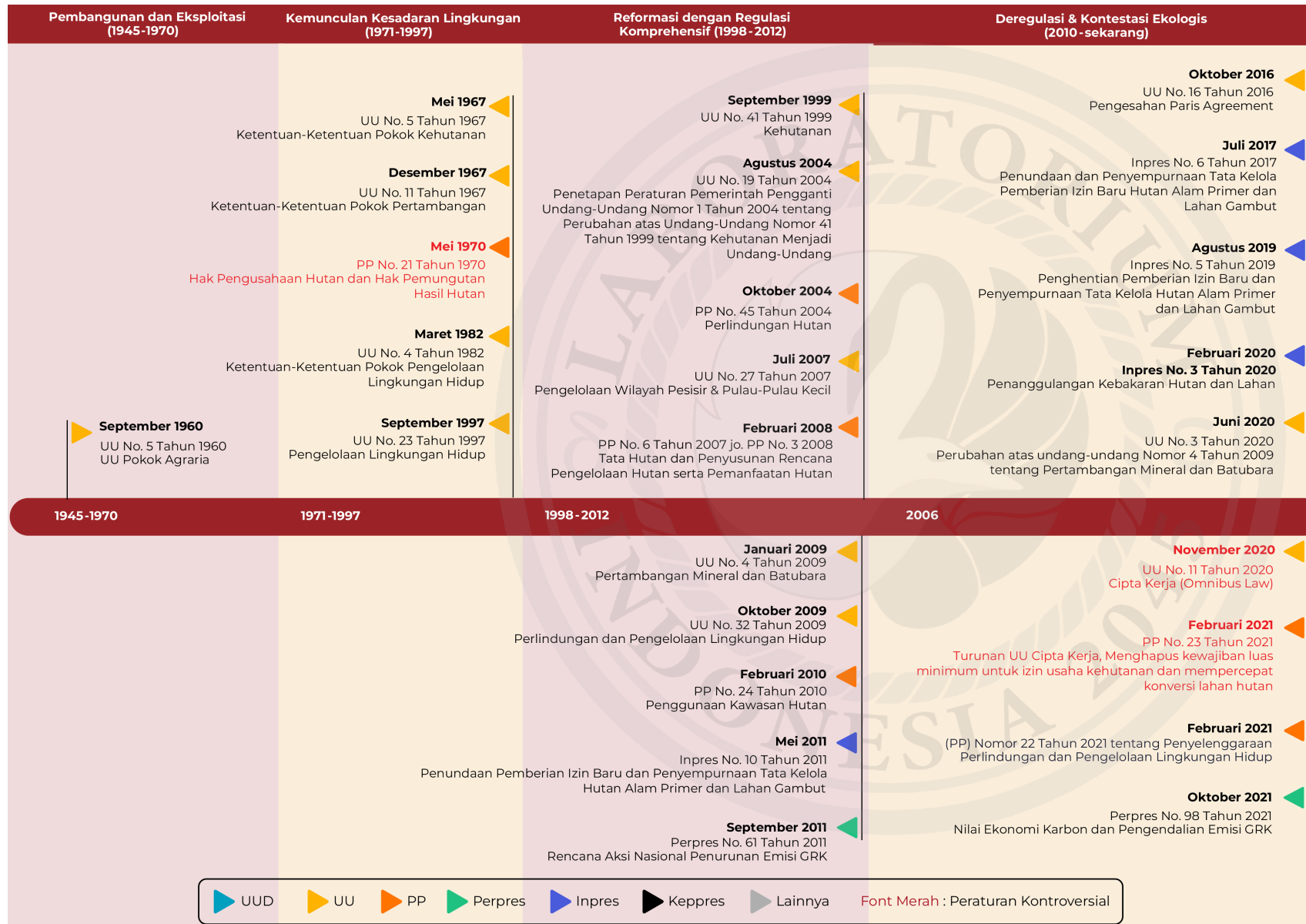
Perkembangan Isu Lingkungan Global dan Domestik



Perubahan kebijakan lingkungan hidup, energi, serta kehutanan di Indonesia **sangat dipengaruhi oleh perkembangan global dan tekanan pasar internasional.**

Ratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti Kyoto Protocol dan Paris Agreement, serta regulasi perdagangan seperti EU Deforestation Regulation menjadi “alat paksa” yang mendorong Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan.

Transformasi Regulasi: Kehutanan

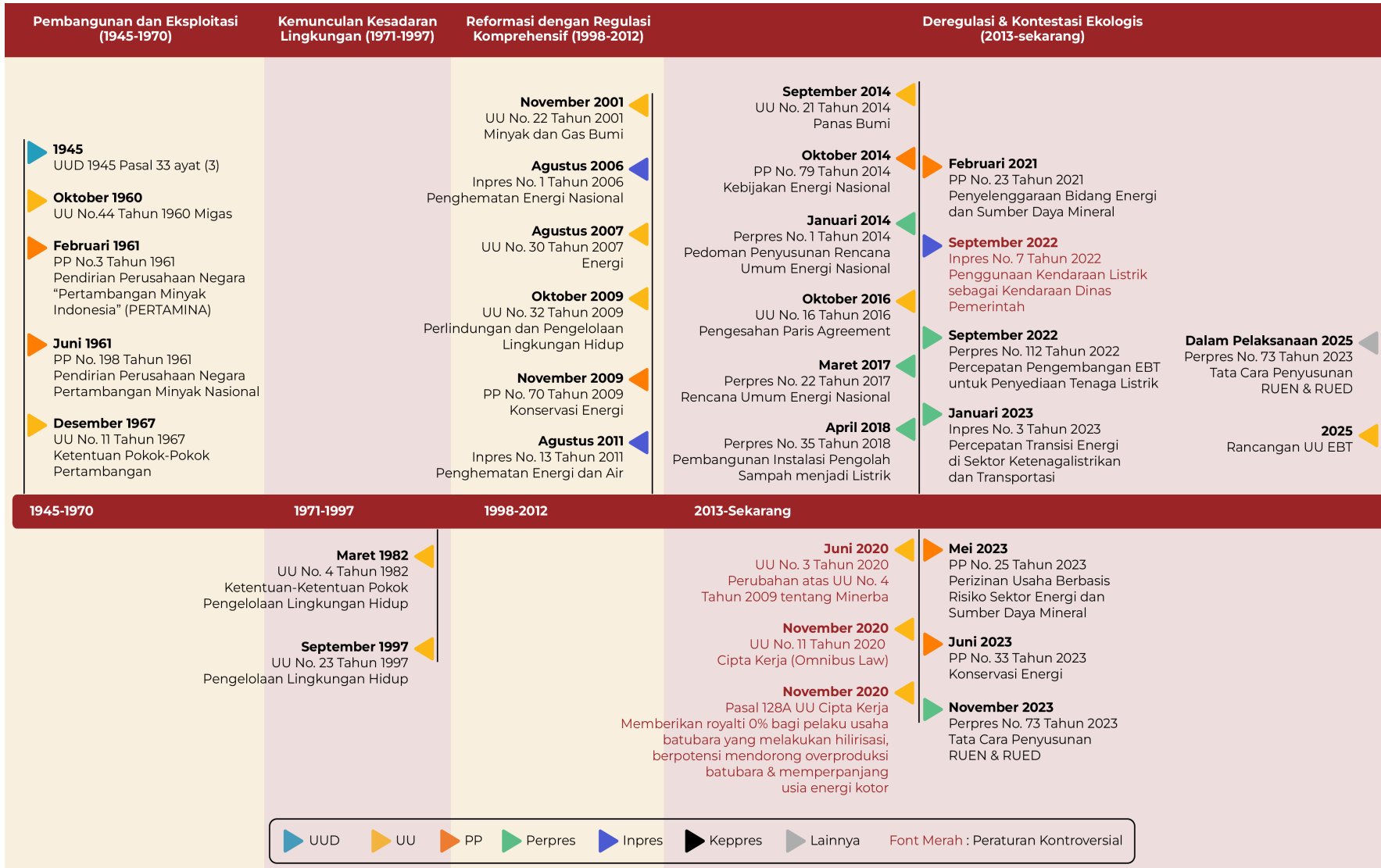


Perkembangan transformasi regulasi lingkungan di Indonesia menunjukkan transformasi bertahap dari paradigma eksploitasi menuju tata kelola berbasis keberlanjutan.

Sejak kemerdekaan, regulasi lingkungan hidup mengalami pergeseran dari kontrol sentralistik negara menuju pengakuan atas hak masyarakat adat, prinsip kehati-hatian, dan partisipasi publik. Akan tetapi, transformasi ini tidak berlangsung linear.

Sumber: Diolah oleh Penulis

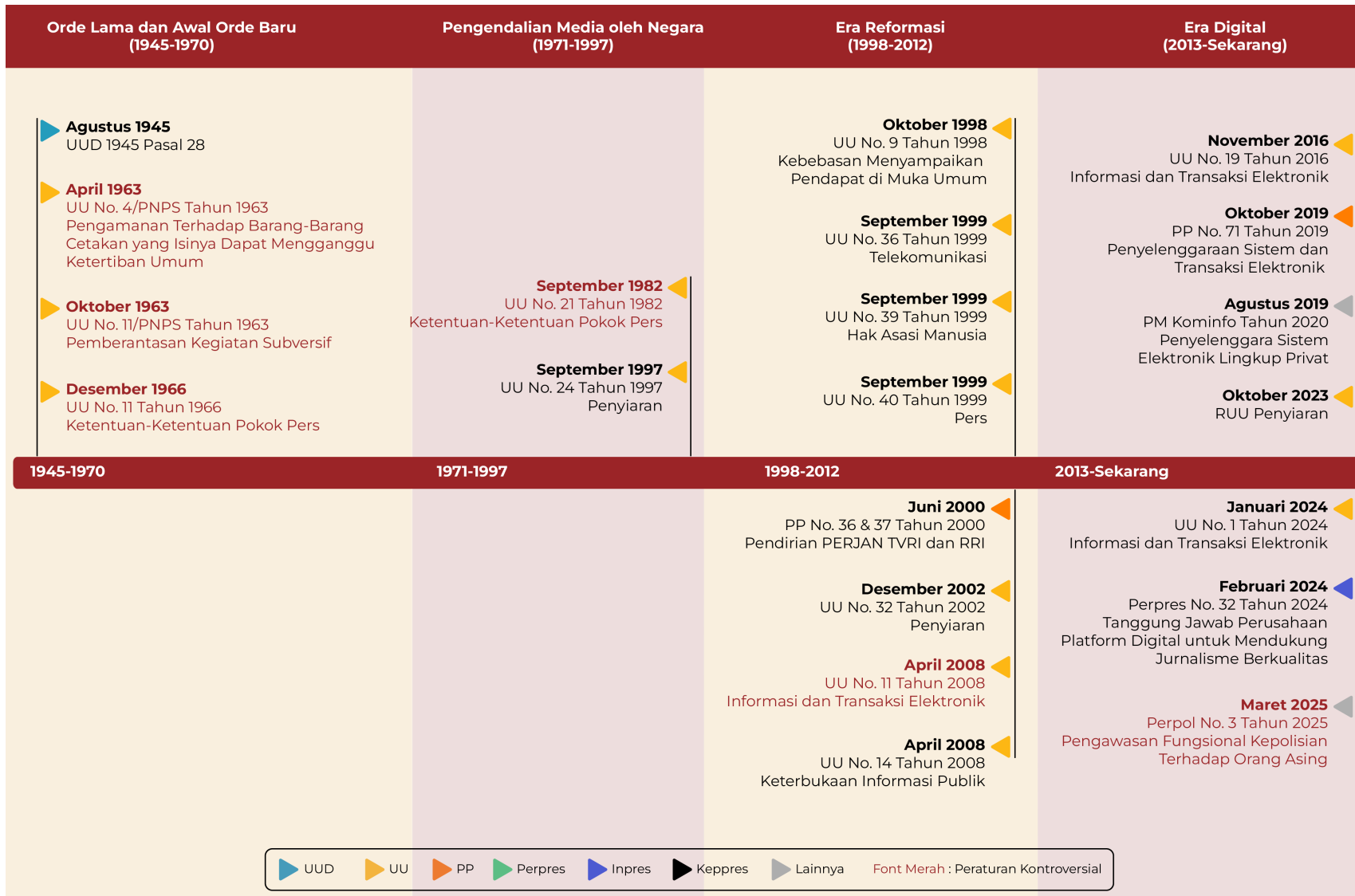
Transformasi Regulasi: Energi



Secara keseluruhan, pola regulatif lingkungan di Indonesia memperlihatkan dinamika antara kontrol negara, pengaruh global, dan partisipasi publik yang terus bernegosiasi dalam ruang kebijakan.

Regulasi lingkungan hidup tidak hanya mencerminkan arah pembangunan, tetapi juga menjadi arena perebutan nilai antara efisiensi ekonomi dan keadilan ekologis.

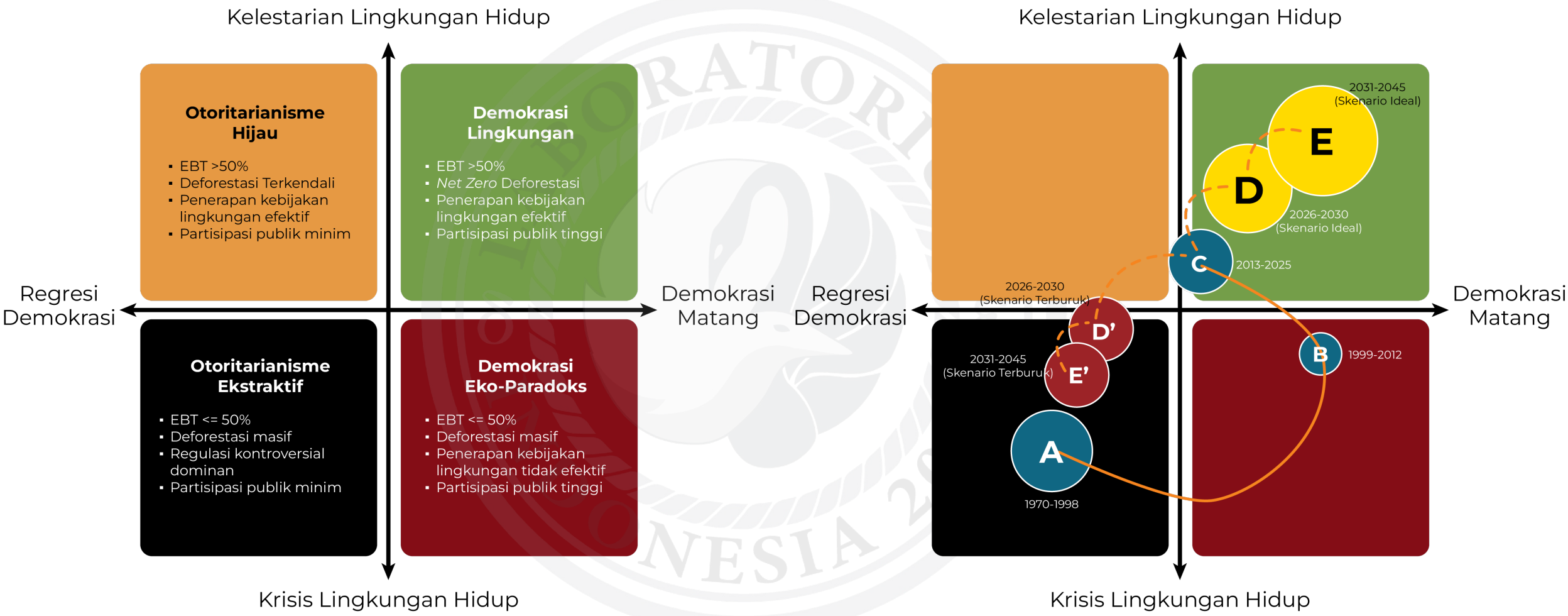
Peran Media



Selama delapan dekade kemerdekaan, pola umum perkembangan media Indonesia menunjukkan ketegangan antara idealisme demokrasi dan realitas kontrol negara serta pasar.

Dalam konteks isu lingkungan, media memiliki potensi besar sebagai penghubung antara ilmu dan publik, tetapi potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan karena tekanan struktural dan rendahnya literasi masyarakat

Proyeksi Ke Depan



Rekomendasi

Penguatan kondisi perekonomian nasional yang berkelanjutan

Mendorong peran partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan

Mempercepat transisi energi dari ketergantungan terhadap energi fosil menuju energi baru dan terbarukan

Melakukan evaluasi terhadap UU Cipta Kerja serta mengkaji ulang program hilirisasi nikel dan *food estate*

Integrasi isu lingkungan ke dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik di level nasional maupun daerah

Pendidikan lingkungan perlu menjadi arus utama dalam sistem pendidikan nasional



Terima Kasih